

IDENTIFIKASI PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PULAU BROMO, KOTA BANJARMASIN

Andi Achmad Priyadharma¹, Dyan Zafira²

^{1,2} Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

¹ Email : zafiradyan@gmail.com

Diterima (received): 02 Desember 2025

Disetujui (accepted): 05 Maret 2026

ABSTRAK

Permasalahan permukiman kumuh masih menjadi tantangan dalam pengelolaan ruang perkotaan, khususnya pada kawasan yang berdekatan dengan aktivitas industri dan memiliki kerentanan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik serta tingkat kekumuhan permukiman di Kawasan Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil, Kota Banjarmasin. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara dengan ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai informan kunci, serta penelusuran data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan permukiman memiliki sejumlah indikator kekumuhan, antara lain kondisi bangunan yang tidak layak huni, jaringan jalan lingkungan dengan lebar rata-rata sekitar 1,5 m, serta pola hunian yang seluruhnya berada di atas badan air sehingga meningkatkan risiko lingkungan dan kesehatan. Kondisi sanitasi juga belum memenuhi standar, ditandai dengan ketiadaan sistem pengolahan air limbah, pembuangan limbah domestik langsung ke perairan, serta pengelolaan persampahan yang belum optimal. Selain itu, sebagian saluran drainase tidak berfungsi dan fasilitas proteksi kebakaran belum tersedia. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator teknis permukiman, kawasan Pulau Bromo termasuk dalam kategori permukiman kumuh sedang, sehingga memerlukan upaya penataan dan penyediaan infrastruktur dasar guna menurunkan kerentanan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci : Kelurahan Mantuil, Permukiman Kumuh, Pulau Bromo

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang dipicu oleh arus migrasi sering menimbulkan kepadatan hunian. Kelompok masyarakat dengan keterbatasan sosial-ekonomi kemudian menempati area yang tidak layak huni hingga membentuk permukiman kumuh. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan memicu masalah sosial seperti kemiskinan serta risiko kesehatan, sehingga penanganannya memerlukan keterlibatan banyak pihak (Saputra, 2022). Peningkatan urbanisasi berpotensi menyebabkan perkembangan permukiman yang tidak teratur, keadaan tersebut mendorong para pendatang untuk menyesuaikan diri dengan pola hidup perkotaan. Namun, banyak yang tidak mampu mengikuti perkembangan dan dinamika kota (Suryanti, 2020).

Permukiman kumuh didefinisikan sebagai kawasan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan, baik dari segi fisik, penyediaan infrastruktur, maupun legalitas kepemilikan lahan. UN-Habitat mengidentifikasi kawasan kumuh sebagai area yang memiliki bangunan tidak layak, tingkat kepadatan tinggi, keterbatasan layanan air bersih dan sanitasi, serta ketiadaan jaminan keamanan

bermukim (UN-Habitat, 2016). Dalam penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKPK), setiap aspek penilaian harus disesuaikan dengan standar teknis dan kelaikan fungsinya, yang mencakup kondisi bangunan gedung, jaringan jalan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, serta sistem proteksi kebakaran (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016).

Kota Banjarmasin memiliki karakteristik geografis yang khas dengan banyaknya aliran sungai yang membentuk pola kehidupan dan permukiman masyarakatnya. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar permukiman tumbuh di sepanjang tepian sungai dengan pola linear mengikuti alur sungai dan tata letak bangunan yang menghadap ke arah sungai maupun jalan (Afdholy, 2017). Salah satu kawasan yang mencerminkan karakteristik tersebut adalah Pulau Bromo yang terletak di Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Pulau ini memiliki luas sekitar 0,94 km² atau setara dengan 94 hektar, dan secara administratif terdiri atas empat Rukun Tetangga (RT), yaitu RT 04, RT 05, RT 06, dan RT 07 (Rifati, 2021). Kawasan ini menjadi contoh permukiman tepian sungai dengan kondisi geografis khas dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang hidup di lahan terbatas di atas badan air.

Masyarakat Pulau Bromo yang tinggal di tepian sungai sangat bergantung pada kondisi lingkungannya. Sungai menjadi sumber kehidupan dan juga ruang untuk beraktivitas dan berinteraksi sosial. Pola pembangunan rumah umumnya mempertimbangkan posisi strategis yang dekat dengan sumber daya alam, sehingga hunian sederhana di tepi sungai menjadi bagian dari identitas budaya kawasan tersebut (Nugroho, 2020). Kebiasaan masyarakat yang bermukim di tepi sungai mendorong peningkatan timbunan sampah, yang semakin sulit ditangani karena keterbatasan pengelolaan dan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Akibatnya kualitas perairan menurun dan muncul pencemaran air, yang di banyak daerah akhirnya memicu krisis air bersih (Hayati, 2022).

Aksesibilitas menuju Kawasan Pulau Bromo relatif terbatas, ditandai oleh kondisi jalan lingkungan yang sempit, keberadaan jembatan kayu yang mulai rusak, serta beberapa ruas jalan dengan permukaan tidak rata. Jaringan jalan di kawasan ini sebagian besar masih berupa titian kayu, terutama pada permukiman di tepi sungai, sementara hanya sebagian kecil yang telah diperkeras menggunakan beton. Material kayu yang sering terendam air sungai menyebabkan struktur jalan mudah mengalami pelapukan (Rifati, 2021). Kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas harian warga, tetapi juga menyulitkan akses kendaraan darurat, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan kawasan terhadap kejadian kebakaran, terutama pada permukiman padat dengan lebar jalan terbatas dan minimnya sarana pendukung pemadaman (Anwar, 2019).

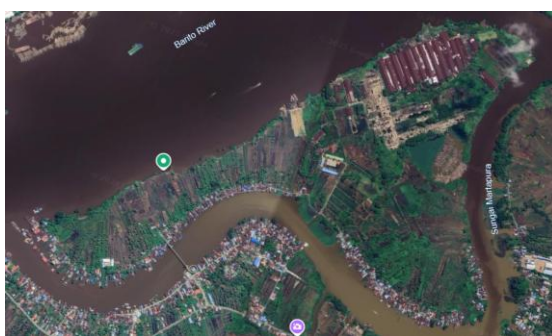
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kawasan penelitian merupakan permukiman di atas badan air yang menghadapi berbagai permasalahan kekumuhan. Keterbatasan lahan, kepadatan bangunan yang tinggi, infrastruktur dasar yang belum memadai, serta aksesibilitas yang terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang sempit menunjukkan rendahnya kualitas lingkungan hunian. Kondisi ini menegaskan perlunya dilakukan identifikasi karakteristik dan tingkat

kekumuhan permukiman di Pulau Bromo sebagai dasar perumusan upaya penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Kota Banjarmasin.

B. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Delta Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kawasan ini berjarak sekitar 3 km dari pusat kota dan merupakan pulau kecil berbentuk delta yang dikelilingi oleh Sungai Martapura dan Sungai Barito. Permukiman di wilayah ini tergolong berpenduduk rendah, dengan hunian yang umumnya berada di sepanjang tepian sungai, sementara bagian lainnya berada di area ladang. Delta Pulau Bromo terdiri atas empat RT, yaitu RT 04, RT 05, RT 06, dan RT 07 (Rizqi Afdholi et al., 2019).



Gambar 1. Citra Satelit Letak Pulau Bromo
Sumber : <http://www.google.com/maps>, 2025

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan dukungan data kualitatif untuk mengidentifikasi karakteristik dan tingkat kekumuhan permukiman di kawasan industri Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil, Kota Banjarmasin. Pendekatan ini bertujuan memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi fisik, sosial, dan lingkungan permukiman berdasarkan indikator teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting hasil survei lapangan terhadap tujuh aspek penilaian kekumuhan, yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran. Hasil analisis ini digunakan untuk menentukan tingkat kekumuhan dan merumuskan arah penanganan permukiman di kawasan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan terhadap kondisi fisik permukiman yang meliputi bangunan hunian, jaringan jalan, drainase, penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, serta ketersediaan fasilitas proteksi kebakaran. Pengumpulan data primer juga dilakukan melalui wawancara

mendalam dengan ketua Rukun Tetangga (RT) pada masing-masing wilayah penelitian sebagai informan kunci terkait kondisi permukiman, jumlah penduduk, dan kepadatan bangunan di wilayahnya. Data sekunder bersumber dari Data Agregat Kependudukan Kota Banjarmasin Tahun 2025, portal Dikayuh Baimbai Kota Banjarmasin, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin, serta dokumen perencanaan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

4. Kriteria dan Indikator Penilaian Kawasan kumuh

Dalam penelitian ini dilakukan penilaian terhadap kondisi permukiman berdasarkan kriteria yang memengaruhi tingkat kekumuhan pada setiap aspek penilaian (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016). Penilaian dilakukan menggunakan metode skoring untuk menilai tingkat kelayakan fisik dan infrastruktur permukiman pada masing-masing indikator. Hasil penilaian ini kemudian dianalisis guna menentukan tingkat kekumuhan tiap Rukun Tetangga (RT) di kawasan penelitian. Berdasarkan hasil tersebut, kawasan dapat dikategorikan ke dalam tipologi permukiman kumuh seperti permukiman di bantaran air, tepi air, dataran rendah, atau daerah rawan bencana. Adapun kriteria pada setiap aspek penilaian kekumuhan disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Klasifikasi penentuan kategori kumuh

No	Aspek Penilaian	Indikator Kekumuhan
1	Kondisi Fisik	Ketidakteraturan bangunan
	Bangunan	Tingkat kepadatan bangunan
		Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis Bangunan
2	Kondisi Jalan	Cakupan jaringan pelayanan jalan lingkungan
	Lingkungan	Kualitas permukaan jalan
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidaktersediaan akses aman air minum
		Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum
4	Kondisi Drainase	Ketidaktersediaan drainase lingkungan
	Lingkungan	Kualitas dan pemeliharaan drainase lingkungan
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis
		Prasarana dan sarana air limbah tidak memenuhi syarat
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis
		Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi standar teknis
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan persampahan tidak terpelihara
		Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran
		Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran

Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016

Berdasarkan indikator kekumuhan pada setiap aspek penilaian yang telah disajikan pada Tabel 1, langkah selanjutnya dilakukan sebagai berikut:

- Pemberian skor setiap indikator kekumuhan dinilai menggunakan skala berdasarkan tingkat kualitas aspek penilaian, dengan ketentuan berikut:

- Tingkat Kondisi 0%–25% : Skor 0
- Tingkat Kondisi 26%–50% : Skor 1
- Tingkat Kondisi 51%–75% : Skor 3
- Tingkat Kondisi 76%–100% : Skor 5

b. Perhitungan setiap total aspek penilaian dihitung menggunakan rumus berikut:

$$P_i = \frac{\sum B_i}{\sum K} \quad (1)$$

dengan keterangan:

P_i = total skor pada setiap variabel

B_i = skor parameter

K = jumlah parameter

c. Klasifikasi tingkat kekumuhan dilakukan berdasarkan nilai total yang diperoleh dari hasil perhitungan, yang kemudian digunakan untuk menentukan kategori tingkat kekumuhan suatu permukiman. Rentang nilai klasifikasi yang digunakan disajikan sebagai berikut:

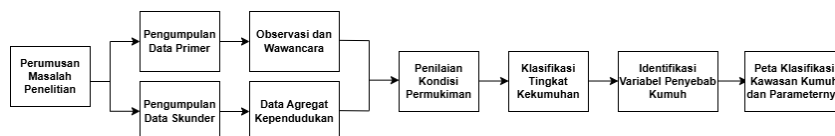
- Tidak Kumuh : 0 – 8,75
- Kumuh Ringan : 8,76 – 17,50
- Kumuh Sedang : 17,51 – 26,25
- Kumuh Berat : 26,26 – 35

5. Identifikasi Variabel Penyebab Kekumuhan

Berdasarkan hasil klasifikasi tingkat kekumuhan, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap hasil scoring tiap aspek penilaian di setiap lokasi penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang memiliki kondisi buruk atau sangat buruk yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya permukiman kumuh. Penentuan kelas kualitas dilakukan dengan pendekatan rentang nilai tengah dari setiap skor pada skala penilaian. Adapun klasifikasi tingkat kualitas aspek penilaian permukiman kumuh ditunjukkan sebagai berikut:

- Kelas 1 (kondisi baik) : 0 – 0,5
- Kelas 2 (kondisi cukup baik) : 0,51 – 2
- Kelas 3 (kondisi buruk) : 2,01 – 4
- Kelas 4 (kondisi sangat buruk) : 4,01 – 5

Hasil identifikasi ini menentukan aspek yang paling memengaruhi kekumuhan dan menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan kualitas permukiman.



Gambar 2. Bagan Alur Metode Penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum Kawasan Penelitian

Kawasan penelitian berada di Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Pulau ini terdiri atas empat Rukun Tetangga (RT), yaitu RT 04, RT 05, RT 06, dan RT 07. Secara umum, kawasan ini diapit oleh Sungai Martapura dan Sungai Barito dengan karakteristik permukiman padat penduduk, di mana sebagian besar rumah berdiri di bantaran sungai dengan konstruksi semi permanen hingga non permanen. Kondisi jalan lingkungan relatif sempit dengan lebar rata-rata sekitar 1,5 meter, sebagian telah dicor namun belum merata pada seluruh wilayah.

Fasilitas dasar seperti saluran drainase, sistem pengelolaan air limbah, dan pengelolaan sampah masih terbatas. Sebagian besar rumah tidak memiliki tangki septik pribadi, sehingga pembuangan air limbah domestik masih dilakukan langsung ke badan sungai. Kondisi ini memperburuk kualitas lingkungan dan meningkatkan potensi pencemaran air. Selain itu, akses terhadap fasilitas proteksi kebakaran juga tergolong rendah. Mobil pemadam kebakaran sulit menjangkau kawasan ini karena harus menyeberangi jembatan dengan lebar hanya sekitar 2,15 meter dan panjang bentang utama 100 meter, yang umumnya hanya dapat dilalui kendaraan roda dua.

2. Hasil Penilaian Indikator Permukiman Kumuh

Tahap analisis diawali dengan melakukan penilaian terhadap masing-masing aspek permukiman untuk mengetahui tingkat kekumuhan pada setiap Rukun Tetangga (RT) di kawasan Pulau Bromo. Penilaian ini dilakukan berdasarkan tujuh aspek utama yang ditetapkan dalam RP2KPKPK, yaitu kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Setiap indikator pada aspek tersebut diberikan skor menggunakan skala 0 hingga 5 sesuai tingkat kualitas kondisi eksisting di lapangan. Hasil perhitungan nilai rata-rata (P_i) pada tiap aspek menjadi dasar untuk menentukan tingkat kekumuhan kawasan.

a. Skoring Aspek Penilaian

Penilaian aspek diperoleh dari hasil pengolahan data skoring berdasarkan hasil indikator kekumuhan. Pemberian skor dilakukan dengan menggunakan skala 0–5, di mana nilai yang lebih tinggi menggambarkan kondisi aspek yang semakin buruk.

Tabel 2. Skoring Aspek Penilaian

No	Aspek Penilaian	RT 04	RT 05	RT 06	RT 07
1	Kondisi Bangunan Gedung	3	3,7	2,3	1,7
2	Kondisi Jalan Lingkungan	2	2	1,5	1,5
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	0	0	0	0
4	Kondisi Drainase Lingkungan	2	2	2	2
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	5	5	5	5
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	3	5	3	1
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	5	5	5	5

b. Klasifikasi dan Tipologi Permukiman Kumuh

Setelah memperoleh total skor dari aspek penilaian setiap RT, langkah berikutnya adalah menentukan tingkat klasifikasi kekumuhan berdasarkan rentang nilai yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Klasifikasi ini membantu mengidentifikasi kategori kawasan permukiman menjadi tidak kumuh, kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat. Proses ini dilakukan dengan menjumlahkan total skor dari tujuh aspek penilaian, kemudian membandingkannya dengan rentang klasifikasi berikut:

Tabel 3. Skoring Aspek Penilaian

RT	Total Skoring	Tingkat Klasifikasi
04	20	Kumuh Sedang
05	22,7	Kumuh Sedang
06	18,8	Kumuh Sedang
07	16,2	Kumuh Ringan

3. Analisis Aspek Penyebab Kekumuhan

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui aspek penilaian yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya kekumuhan pada setiap RT. Identifikasi dilakukan dengan melihat aspek yang memiliki skor tinggi atau tergolong dalam kondisi permukiman buruk dan sangat buruk. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui faktor-faktor prioritas yang memerlukan penanganan seperti kualitas bangunan, keterbatasan infrastruktur dasar, maupun rendahnya sistem pengelolaan lingkungan. Hasil identifikasi aspek yang paling dominan sebagai penyebab kekumuhan pada setiap RT disajikan pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Aspek Penyebab Permukiman Kumuh

RT	Aspek Penyebab Permukiman Kumuh
04	Kondisi Pengelolaan Air Limbah dan Kondisi Proteksi Kebakaran
05	Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Pengelolaan Air Limbah, Kondisi Pengelolaan Persampahan, dan Kondisi Proteksi Kebakaran
06	Kondisi Pengelolaan Air Limbah dan Kondisi Proteksi Kebakaran
07	Kondisi Pengelolaan Air Limbah dan Kondisi Proteksi Kebakaran

Berdasarkan tabel tersebut, uraian kondisi lapangan pada setiap aspek dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Kondisi Bangunan Gedung: Bangunan di kawasan Pulau Bromo, khususnya pada RT 05 menunjukkan tingkat kepadatan yang tinggi dengan susunan rumah yang tidak teratur. Beberapa rumah tergolong Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) karena tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan seperti kualitas material dan jarak antarbangunan yang sangat sempit. Kondisi ini menggambarkan rendahnya kualitas fisik bangunan serta keterbatasan lahan yang menyebabkan pola permukiman padat dan tidak tertata.



Gambar 3. Kondisi Bangunan
Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2025

- (2) Kondisi Jalan Lingkungan: Jaringan jalan lingkungan di Pulau Bromo memiliki lebar rata-rata sekitar 1,5 meter, sebagian telah menggunakan perkerasan cor beton. Namun, kondisi jalan ini belum termasuk dalam aspek dominan penyebab kekumuhan karena masih dapat difungsikan sebagai akses utama bagi warga setempat.



Gambar 4. Kondisi Jalan Lingkungan
Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2025

- (3) Kondisi Penyediaan Air Minum: Akses terhadap air minum di wilayah Pulau Bromo tergolong cukup baik. Masyarakat telah memperoleh pasokan air bersih dari dua sumber utama, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pulau Bromo dan Aliran Sungai Mantuil yang dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga.



Gambar 5. Kondisi Penyediaan Air Minum
Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2025

- (4) Kondisi Drainase Lingkungan: Kondisi drainase lingkungan di Pulau Bromo relatif baik karena tidak ditemukan adanya genangan air pada area permukiman. Hal ini disebabkan oleh lokasi permukiman yang berada atas badan air, sehingga air limpasan langsung mengalir ke sungai tanpa memerlukan sistem drainase tambahan. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebagian lantai rumah warga masih berada di bawah elevasi jalan sehingga berpotensi mengalami kelembapan atau rembesan air saat pasang sungai.



Gambar 6. Kondisi Drainase Lingkungan
Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2025

- (5) Kondisi Pengelolaan Air Limbah: Aspek ini menjadi penyebab utama kekumuhan di seluruh RT. Hampir seluruh rumah tidak memiliki sistem septik tank, dan pembuangan air limbah domestik dilakukan langsung ke badan sungai melalui jamban gantung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sanitasi di kawasan Pulau Bromo belum memenuhi standar teknis kesehatan lingkungan dan berpotensi mencemari ekosistem perairan.



Gambar 7. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2025

- (6) Kondisi Pengelolaan Persampahan: Sistem pengelolaan persampahan di kawasan penelitian belum berjalan dengan baik. Masyarakat masih membuang sampah langsung ke sungai karena tidak tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan maupun pengangkutan sampah. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan berpotensi menimbulkan pencemaran serta penyumbatan aliran air.



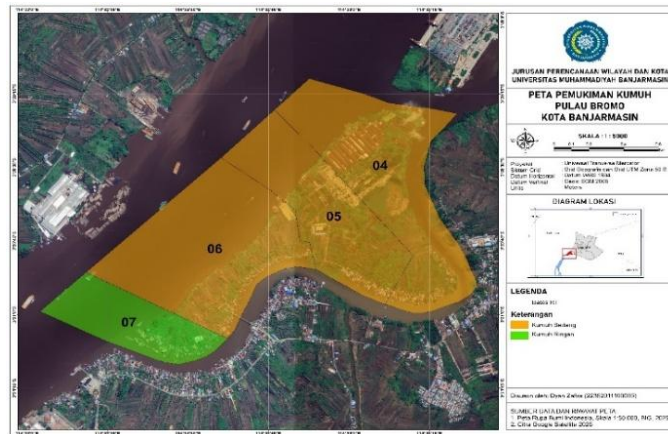
Gambar 8. Kondisi Persampahan
Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2025

- (7) Kondisi Proteksi Kebakaran: Sarana proteksi kebakaran di Pulau Bromo belum tersedia secara memadai dan masih dalam tahap usulan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Keterbatasan akses menuju kawasan, yang hanya dapat dilalui melalui jembatan dengan lebar sekitar 2,15 meter dan panjang bentang utama 100 meter, menjadi kendala utama bagi mobil pemadam kebakaran untuk menjangkau lokasi jika terjadi kebakaran. Kondisi ini menempatkan Pulau Bromo sebagai kawasan dengan tingkat kerentanan kebakaran yang tinggi.



Gambar 9. Jembatan Pulau Bromo
Sumber : Banjarmasin Post Online, 2021

Berdasarkan hasil penilaian terhadap tujuh aspek yang ditetapkan dalam RP2KPKPK, terlihat bahwa Pulau Bromo masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar yang memengaruhi kualitas permukimannya. Meskipun penyediaan air minum dan kondisi drainase berada dalam kategori cukup baik, aspek sanitasi, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran masih menunjukkan kondisi rendah dan memerlukan penanganan segera. Kepadatan bangunan yang tinggi serta pola hunian yang tidak tertata turut meningkatkan kerentanan kawasan, terutama terhadap risiko kebakaran dan penurunan kualitas lingkungan. Temuan tersebut memberikan gambaran mengenai aspek yang perlu diprioritaskan dan menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas permukiman pada tahap analisis berikutnya. Dengan demikian, hasil identifikasi ini tidak hanya menggambarkan kondisi eksisting, tetapi juga mengarahkan fokus intervensi yang diperlukan bagi perbaikan kawasan Pulau Bromo.



Gambar 10. Peta Permukiman Kumuh di Pulau Bromo
Sumber : Hasil Identifikasi Peneliti, 2025

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tujuh aspek penilaian RP2KPKPK, seluruh RT di Kawasan Pulau Bromo, yaitu RT 04, RT 05, RT 06, dan RT 07, berada pada kategori permukiman kumuh ringan hingga sedang. Permasalahan yang paling dominan pada seluruh RT adalah ketiadaan sistem pengelolaan air limbah yang layak serta belum tersedianya sarana proteksi kebakaran. Limbah domestik rumah tangga masih dibuang langsung ke badan sungai, sementara fasilitas penanganan kebakaran pada skala lingkungan belum tersedia. RT 05 menunjukkan tingkat permasalahan yang relatif lebih kompleks karena selain dua isu utama tersebut, sebagian besar bangunan hunian tidak memenuhi standar kelayakan serta pengelolaan persampahan belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, aspek penyediaan air minum dan kondisi drainase secara umum masih berada pada kategori cukup baik.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pola hunian padat di atas badan air yang tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar berpotensi meningkatkan risiko lingkungan dan keselamatan permukiman. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dari Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya melalui pembangunan sistem pengolahan air limbah komunal yang adaptif terhadap karakteristik lahan basah serta pengadaan sarana proteksi kebakaran skala lingkungan. Upaya tersebut perlu didukung oleh peningkatan pengelolaan persampahan dan penguatan kesadaran masyarakat agar perbaikan kualitas permukiman dapat berlangsung secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Saputra, W., Hapiz Hermansyah, M., Studi Sains Lingkungan, P., & Sains dan Teknologi, F. (n.d.). *Environmental Science Journal (ESJo) : Jurnal Ilmu Lingkungan PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN: PENYEBAB, DAMPAK DAN SOLUSI*. <http://journal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/esjo>

- Suryanti, N., Brintiska Putri, K., Taqiyah, Y. S., & Arsitektur, J. (n.d.). *Seminar Karya & Pameran Arsitektur Indonesia: Sustainability in Architecture 2020* 86 | *Sakapari 6 + SIA 2020*.
- UN-Habitat, 2016. *Slum Almanac 2015/2016: Tracking Improvement in the Lives of Slum Dwellers*. Nairobi: *United Nations Human Settlements Programme*.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2016). Panduan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Nugroho, A. R., Riadi, S., Normelani, E., & Sari, Y. P. (2020). Kajian karakter budaya masyarakat kawasan permukiman gosong sungai (bars): Studi kasus Kampung Apung Pulau Bromo Kota Banjarmasin. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 1(1), 30–42.
- Afdholy, A. R. (2017). Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin. *Local Wisdom : Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 9(1). <https://doi.org/10.26905/lw.v9i1.1865>
- Rifati, N. A. (2021). Strategi pengembangan Pulau Bromo sebagai kawasan ekowisata ruang terbuka hijau di Kota Banjarmasin (Undergraduate thesis). Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Hayati, M., Tinggi, S., Hukum, I., & Adam, S. (n.d.). TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN SUNGAI KOTA BANJARMASIN. *Agustus 2022*, 10(02). <https://banjarmasinkota.bps.go.id/statictable/2015/03/15/280/daftar-nama-sungai-di-kota-banjarmasin-beserta-data->
- Anwar, Y. (2019). KERENTANAN KEBAKARAN PERMUKIMAN PADAT DI KELURAHAN SIDODAMAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR KOTA SAMARINDA. *Jurnal Azimut*, 2(2), 121–132. <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/azimut121><https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/azimut>
- Rizqi Afdholy, A., Dwi Wulandari, L., Utami, S., Magister Arsitektur Lingkungan Binaan, P., Teknik, F., Brawijaya, U., Pengajar, S., & Arsitektur, J. (2019). *TIPOLOGI FUNGSI RUMAH TEPIAN SUNGAI DI PINGGIRAN KOTA BANJARMASIN (Typology of Riverside House Function in Banjarmasin Periphery)*. <https://journal.umbjm.ac.id/index.php/jamang/>